

Siaran Pers

PEMANFAATAN DEMOGRAFI INDONESIA DI SEKTOR KEPARIWISATAAN, KEBAHARIAN, DAN EKONOMI KREATIF

Jakarta (29/8) – Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Yayasan Bhakti Bangsa dan didukung oleh Lembaga Demografi FEB-UI, Universitas Trilogi, KOSGORO dan PT Semen Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional Demografi bertema “Pemanfaatan Demografi Indonesia di Sektor Kepariwisata, Kebaharian, dan Ekonomi Kreatif”, Selasa pagi. Seminar dilaksanakan untuk mendapatkan solusi tepat, efektif dan berkesinambungan bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan nasional khususnya di sektor kepariwisataan, kebaharian dan ekonomi kreatif. Cepatnya perubahan demografi di tanah air akan membawa Indonesia pada kondisi *windows of opportunity*, di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2030. Dalam periode tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara dengan angkatan kerja terbanyak di Asia. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi akibat adanya konsumsi yang tinggi, peningkatan investasi, produktivitas, dan penurunan angka ketergantungan.

Kondisi tersebut sudah dikenal masyarakat dengan istilah bonus demografi. Data Badan Pusat Statistik memproyeksikan bahwa pada tahun 2019, kelompok usia produktif akan mencapai besaran 67 persen dari total populasi penduduk dan sebanyak 45 persen dari 67 persen tersebut berusia antara 15–34 tahun. Namun, setelah 2030, angka ketergantungan mulai mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (65 tahun ke atas) meningkat. Hingga pada 2045, Indonesia sudah menjadi *aging society* dengan perkiraan penduduk tua mencapai 12,45 persen dari total penduduk. Perubahan struktur penduduk merupakan peluang untuk memanfaatkan produktivitas penduduk usia produktif agar mendorong pertumbuhan ekonomi negara. “Namun, bonus demografi dapat menjadi bencana demografi jika sumber daya manusia tidak memiliki kualitas baik yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Untuk itu, Indonesia perlu mempertimbangkan kebijakan untuk mengoptimalkan perubahan struktur penduduk tersebut,” ujar Menteri Bambang.

Beberapa permasalahan yang perlu segera diselesaikan antara lain adalah rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia muda Indonesia dalam kompetisi baik di regional ASEAN maupun kompetisi global, terbatasnya data kebutuhan keahlian tenaga kerja, ketidaksesuaian (*mismatch*) keahlian pekerja dengan kebutuhan industri, masih banyaknya tenaga kerja yang belum tersertifikasi, serta belum kuatnya minat pemuda Indonesia untuk berwirausaha. Mengingat tantangan demografi ini merupakan isu lintas sektoral, pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan terus menguatkan koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, industri, dunia pendidikan serta masyarakat perlu terus dilakukan dalam rangka menyiapkan potensi kelompok usia muda dalam menjawab tantangan demografi. Optimalisasi fungsi dan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pendidikan kejuruan di seluruh Indonesia dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan serta penyusunan standar kompetensi keahlian perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja muda di Indonesia.

Saat ini, pemanfaatan pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif masih belum optimal. Salah satunya terlihat dari Angka Partisipasi Kerja 2015 yang tercatat masih sekitar 66 persen dengan kenaikan yang relatif lambat. Rendahnya angka tersebut menunjukkan masih tingginya jumlah pengangguran yang berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas. Untuk itu, strategi kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang efektif dan berkesinambungan perlu disusun melalui kerja sama dan koordinasi lintas sektor dari berbagai pihak. “Ada empat strategi utama yang menjadi perhatian pemerintah agar pembangunan ketenagakerjaan secara efektif dapat mendukung terwujudnya peningkatan produktivitas, yaitu sertifikasi kompetensi, pengembangan program kemitraan, peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, serta perluasan skala ekonomi sektor atau sub sektor dengan produktivitas tinggi,” ungkap Menteri Bambang.

Indonesia sudah memiliki lebih dari 50 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pariwisata, kebaharian, dan ekonomi kreatif yang telah disusun. Ada pula 14 BLK maritim, 16 BLK kejuruan pariwisata, 522 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kebaharian/maritim, 982 SMK kejuruan pariwisata, 4174 SMK kejuruan ekonomi kreatif, 16 politeknik/Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan sekolah tinggi kelautan perikanan, 57 akademi kepariwisataan, 14 sekolah tinggi kepariwisataan, dan dua politeknik kepariwisataan. Sektor kebaharian atau kemaritiman memiliki cakupan potensi yang luas, termasuk transportasi laut, sumber daya hayati laut, sumber daya ikan, bioteknologi laut, sumber daya mineral dan energi, wisata bahari, dan jasa lingkungan. Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia sangat berlimpah dengan luas wilayah, masyarakat, dan potensi perekonomian laut yang besar. Namun, kontribusi sektor maritim terhadap pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah, hanya sekitar empat persen. Rendahnya kontribusi tersebut salah satunya disebabkan oleh infrastruktur kemaritiman di Indonesia yang belum terbangun dengan baik dan merata sehingga menyebabkan biaya yang tinggi. Infrastruktur kemaritiman yang baik diharapkan dapat mengurangi biaya logistik yang mencapai 25 persen dari produk domestik bruto (PDB). Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah sedang mengupayakan untuk membangun enam rute subsidi angkutan barang tol laut pada pelabuhan non komersial pada 2016.

Mengingat sektor kemaritiman sangat penting dan strategis, pemerintah telah melakukan berbagai upaya revitalisasi pendidikan vokasi kemaritiman, di antaranya kolaborasi Kemdikbud, Kemristekdikti, dan Kementerian Perhubungan dalam mengembangkan *Maritime Education Training*, serta pengembangan pendidikan tinggi vokasi maritim melalui sepuluh politeknik (Bengkalis, Polimarin Semarang, Tual, Pangkep, Samarinda, Surabaya, Lhokseumawe, Lampung, Banyuwangi dan Indramayu) yang dilaksanakan Kemristekdikti. Di sektor kebaharian, dari 125,4 juta angkatan kerja pada Agustus 2016, hanya 0,2 persen atau sekitar 272 ribu orang yang mempunyai latar belakang pendidikan bidang studi kebaharian dan hanya sekitar 44 persen angkatan kerja yang memperoleh pelatihan. Sebagian besar memiliki gelar SMK dan Diploma IV/S1, terdiri atas pekerja sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 27,22 persen dan lembaga keuangan sebanyak 14,45 persen. Padahal, seharusnya lulusan tersebut banyak diserap di sektor pertanian, transportasi dan industri. Di sektor pariwisata, pemerintah juga telah berupaya mengembangkan kawasan prioritas industri dan pariwisata, termasuk kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan kawasan pariwisata lainnya. Diperkirakan, jumlah tenaga kerja sektor pariwisata akan mencapai 12,4 juta orang pada 2017.

Pada sektor ekonomi kreatif, sub sektor kuliner, industri mode, dan kriya merupakan penyumbang PDB terbanyak. Kondisi ketenagakerjaan di sektor ekonomi kreatif menunjukkan hanya 2,25 persen atau sekitar 2,8 juta orang yang mempunyai latar belakang pendidikan bidang studi seni, kriya, dan bidang relevan lainnya, dan hanya 26,89 persen yang pernah mendapat pelatihan. Sebagian besar memiliki gelar SMK dan Diploma IV/S1 dan bekerja di sektor perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan industri pengolahan. "Ke depan, tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif masih terkait dengan kualitas sumber daya manusia, kemampuan menjaring tenaga kerja berkualitas, kesenjangan antardaerah, persaingan internasional, institusi publik yang kurang ramah inovasi, infrastruktur digital yang kurang bersaing, akses pendanaan, dan kehadiran kecerdasan artifisial yang belum secara optimal dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan komersial secara luas," tutup Menteri Bambang.

Jakarta, 29 Agustus 2017

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650
Faksimile: (021) 31901154
Email: humas@bappenas.go.id